



Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



# INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 2022



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Bekerjasama dengan  
Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Provinsi Kalimantan Timur



# **LAPORAN**

**KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL  
DAN KEPENDUDUKAN**

**SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT**

**INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**

**Hak Cipta: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022**

# Lembar Pengesahan

Laporan ini telah disahkan oleh:

**Kabid. Sosial Budaya & Kependudukan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Ketua Tim  
Balai Pelestarian Cagar Budaya  
Provinsi Kalimantan Timur**

**Dr. H. Tulus Sutopo, S.Pd, MM,Pd.  
NIP 197005271997021004**

**Drs. Budi Istiawan  
NIP 196609211993031001**

# Penyusun

## **1. Tim Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**

## **2. Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur**

- Drs. Budi Istiawan
- Eva Rusdiana, S.E.
- Vinsensius Ngesti Wahyuono, S.S.
- Fithriani Jamaluddin, S.S.
- Sarah Khaizuron, S.Pd.
- Andi Ilham Badawi, S.Pd.
- Andika Arief Drajat Priyatno, S.S.
- Kartika Nurani, S.M.
- Rubianta

## **Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Diterbitkan oleh:

**Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah**

**Kabupaten Kutai Kartanegara** bekerjasama dengan

**Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur**

# Ringkasan

Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai upaya mengukur capaian pembangunan di tingkat daerah. IPK disusun berdasarkan tujuh (7) dimensi yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Ketujuh dimensi ini memuat masing-masing indikator dengan total 31 indikator yang merepresentasikan pelbagai aspek penyokong kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kekayaan khazanah kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan hasil perhitungan IPK Tahun 2022 sangat penting dalam rangka mendorong lahirnya kebijakan pembangunan kebudayaan yang presisi dan tepat sasaran. IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 memperoleh hasil yang cukup memuaskan dengan angka 49,08, meskipun lebih rendah dibanding nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur yang berada di angka 52,49. Apabila dibandingkan pada nilai tiap dimensi, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki empat (4) dimensi yang memperoleh nilai di atas Provinsi Kalimantan Timur yaitu pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya. Sementara dimensi ekonomi budaya, budaya literasi, dan gender masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur.

Nilai hasil perhitungan IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang cukup memuaskan pada tiap dimensinya mencerminkan adanya prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional. Situasi kerukunan umat beragama, suku, ras, dan golongan di wilayah ini juga sangat baik, bahkan belum pernah terjadi konflik yang eskalatif. Meski demikian, beberapa indikator memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendorong lahirnya pelaku seni yang menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan utama dengan memberi pelatihan, *sponsorship*, publikasi, hingga promosi. Peningkatan minat baca dengan menyediakan beragam buku bacaan, pustakawan, dan sarana prasarana penunjang di tiap perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan desa.

# Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 31 September s.d. 10 November 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya kami mengalami permasalahan dan kesulitan di lapangan meskipun demikian kegiatan ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak dan kerjasama yang baik yang terjalin di antara sesama anggota tim.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberi arahan dalam kegiatan;
2. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur, yang telah memberikan arahan dalam kegiatan;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan bantuan dan arahnya;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan bantuan dan arahnya;
5. Beberapa pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan mulai dari persiapan kegiatan hingga tersusunnya laporan kegiatan ini.

Harapan yang tulus dari tim tidak lain hanyalah saran yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan pemahaman akan pentingnya pembangunan kebudayaan. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan pada yang presisi dan tepat sasaran.

Samarinda, Desember 2022

Penyusun

# Daftar Isi

	<b>LEMBAR HAK CIPTA</b>
	<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>
	<b>TIM PENYUSUN</b>
	<b>RINGKASAN</b>
	<b>KATA PENGANTAR</b>
	<b>DAFTAR ISI</b>
	<b>DAFTAR TABEL</b>
	<b>DAFTAR GAMBAR</b>
<b>1</b>	<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>
<b>5</b>	<b>BAB II: METODOLOGI PERHITUNGAN</b>
<b>13</b>	<b>BAB III: HASIL PERHITUNGAN IPK TAHUN 2022</b>
<b>34</b>	<b>BAB IV: PENUTUP</b>
<b>35</b>	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>
<b>36</b>	<b>LAMPIRAN</b>

# Daftar Tabel

Tabel 2.1: Daftar Indikator IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.....	5
Tabel 2.2: Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan IPK .....	9
Tabel 3.1: Hasil Perhitungan IPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022.....	13
Tabel 3.2: Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.....	14

# Daftar Gambar

Gambar 3.1: Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.....	32
Gambar 3.2: Perbandingan IPK Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IPK Kalimantan Timur.....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara adikuasa di bidang kebudayaan. Sebagai negara-bangsa bercorak majemuk dengan latar belakang sosial yang beragam: suku, ras, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama, negara ini memiliki khazanah kebudayaan yang sangat kaya dan melimpah. Khazanah kebudayaan yang sangat beragam ini bukan saja menunjukkan kualitas sebuah bangsa, tetapi juga menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Kekayaan kasanah budaya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten yang memiliki luas daratan sebesar 27.263,10 km<sup>2</sup> dan luas perairan sekitar 4.097 km<sup>2</sup> ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 18 kecamatan, 44 kelurahan, dan 193 desa. Wilayah Kutai Kartanegara didiami oleh 734.485 jiwa, dengan keragaman suku, ras, adat istiadat, budaya, agama, dan bahasa. Sejarah Kutai Kartanegara tercatat dimulai sekitar abad ke-4 Masehi, ditandai dengan ditemukannya tujuh prasasti yang mengisahkan kekuasaan Raja Mulawarman. Sejak era tersebut, peradaban di wilayah Kutai Kartanegara kian berkembang hingga masuknya Islam pada abad ke-14 sampai pada era modern saat ini. Sejarah panjang inilah yang menjadikan wilayah Kutai Kartanegara memiliki kekayaan khazanah kebudayaan yang begitu melimpah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32, mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, nilai budaya dan sikap mental seperti

etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang yang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa.

Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah pusat melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah menetapkan langkah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah peradaban dunia.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, tentunya diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat sasaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Tentunya data-data tersebut didapatkan melalui tingkatan yang paling mendasar, salah satunya adalah data di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tingkat kabupaten pada Tahun Anggaran 2022 ini.

Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) Dimensi Ekonomi Budaya; (2) Dimensi Pendidikan; (3) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya; (4) Dimensi Warisan Budaya; (5) Dimensi Ekspresi Budaya; (6) Dimensi Budaya Literasi; dan (7) Dimensi Kesetaraan Gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, pembangunan kebudayaan di tingkat provinsi sudah cukup baik, namun

masih harus perlu ditingkatkan. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur dengan rentang nilai 0 – 100 adalah sebesar 52.49. Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: Dimensi Ekonomi Budaya (29.65), Dimensi Pendidikan (72.20), Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (72.46), Dimensi Warisan Budaya (37.44), Dimensi Ekspresi Budaya (24.33), Dimensi Budaya Literasi (60.09), dan dimensi Kesetaraan Gender (55.88). Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini masih lebih tinggi daripada Nilai IPK Nasional yang hanya sebesar 51.90.

Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Hasil dari IPK ini akan digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang *knowledge-based* oleh para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kebudayaan yang lebih presisi dan tepat sasaran. Selain itu, data IPK juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya ;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

- 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 46);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 49).

## BAB II

# METODOLOGI PERHITUNGAN

### A. Indikator IPK

Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mengambil data objek dari 7 (tujuh) dimensi IPK berdasarkan *Handbook IPK Nasional dan Provinsi Tahun 2018*, yakni: (1) Dimensi Ekonomi Budaya; (2) Dimensi Pendidikan; (3) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya; (4) Dimensi Warisan Budaya; (5) Dimensi Ekspresi Budaya; (6) Dimensi Budaya Literasi; dan (7) Dimensi Kesetaraan Gender. Ketujuh dimensi IPK ini masing-masing memuat indikator yang dianggap paling merepresentasikan capaian atas pembangunan kebudayaan.

Tabel 2.1: Daftar Indikator IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max
<b>Dimensi 1. Ekonomi Budaya (D1)</b>					
Definisi Operasional : Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Kebudayaan.					
1	X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0	1	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
<b>Dimensi 2. Pendidikan (D2)</b>					
Definisi Operasional : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa.					
2	X2.1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+	0	15	Standar UN dan sudah digunakan di IPM
3	X2.2	Harapan lama sekolah penduduk usia 7+	0	18	Standar UN dan sudah digunakan di IPM

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max
4	X2.3	Angka Kesiapan Sekolah	0	100	Standar
5	X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian	0	45	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
6	X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	0	100	Standar
7	X2.6	Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah	0	100	Standar

### Dimensi 3. Ketahanan Sosial Budaya (D3)

Definisi Operasional : Kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

8	X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100	Standar
9	X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100	Standar
10	X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama	0	100	Standar
11	X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku	0	100	Standar
12	X3.5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	0	100	Standar
13	X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	0	100	Standar

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max
14	X3.7	Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	0	50	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
15	X3.8	Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga	0	100	Standar

#### Dimensi 4. Warisan Budaya (D4)

Definisi Operasional : Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

16	X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	0	50	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
17	X4.2	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	0	50	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
18	X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	0	100	Standar
19	X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	0	70	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
20	X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	0	30	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
21	X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	0	95	Nilai maksimum empiris + standar deviasi

#### Dimensi 5. Kebebasan Ekspresi Budaya (D5)

Definisi Operasional : Segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat.

22	X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	0	30	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
----	------	---	---	----	--

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max
23	X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	0	20	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
24	X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	0	7	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
25	X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	0	45	Nilai maksimum empiris + standar deviasi

#### Dimensi 6. Budaya Literasi (D6)

Definisi Operasional : Aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat.

26	X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	0	70	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
27	X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	0	85	Nilai maksimum empiris + standar deviasi
28	X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan Masyarakat	0	25	Nilai maksimum empiris + standar deviasi

#### Dimensi 7. Gender (D7)

Definisi Operasional : Persamaan hak, tanggung jawab dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

29	X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	0	100	Standar
30	X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	0	100	Standar
31	X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	0	100	Standar

## B. Pengumpulan Data Indikator IPK

Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yang terdiri atas tenaga fungsional Bidang Sosial-Ekonomi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan tenaga peneliti dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2: Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan IPK  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Dasar Pelaksanaan												
2.	Penyusunan KAK dan Proposal												
3.	Pengumpulan Data Sekunder												
4.	Pengumpulan Data Primer												
5.	Analisis Hasil Pengumpulan Data												
6.	Penyusunan Draft Laporan Akhir												
7.	Seminar Laporan Akhir												
8.	Pengesahan Laporan Akhir												

Pengumpulan data IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 terbagi menjadi dua tahapan yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari hasil Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (MSBP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Survei Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Survei Ketahanan Sosial (Hansos) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Survei Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, dan Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2021. Data primer ini merupakan data berbentuk persentase, angka, rasio, dan rata-rata dari hasil susenas yang telah disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Data yang tersedia tersebut selanjutnya disesuaikan untuk mengisi nilai dari setiap indikator IPK.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, untuk data hasil susenas MSBP adalah data survei untuk Provinsi Kalimantan Timur saja dengan jumlah sampel sekitar 1.600-an yang belum dapat

dikatakan valid apabila dibandingkan dengan survei yang dilakukan dengan jumlah sampel yang besar di tiap kabupaten. Sehingga data survei khusus wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat diperoleh secara detail. Tetapi, untuk data hasil susenas KOR, Angkatan Kerja, dan Ketahanan Sosial, telah diestimasi untuk level Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dikatakan valid.

Data sekunder didapatkan melalui serangkaian wawancara dengan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Museum Negeri Mulawarman, Situs Gunung Selendang Sangasanga, Kantor Kecamatan Loa Kulu, Kantor Kecamatan Sangasanga, dan Kantor Desa Jembayan. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk melakukan *ground checking* (pengecekan lapangan) ke instansi terkait sesuai dengan indikator IPK yang diukur agar diperoleh data yang menggambarkan fakta di lapangan. Selain itu, pengecekan lapangan juga dilaksanakan untuk memperoleh data indikator IPK dari susenas MSBP yang belum diestimasi ke level Kabupaten Kutai Kartanegara. Meski demikian, data yang diperoleh dari hasil wawancara belum dapat mencerminkan data sebenarnya karena tidak dilakukan survei langsung kepada para responden masyarakat di setiap kecamatan. Perhitungan nilai indikator IPK dari data hasil wawancara yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif diestimasi secara *direct* (langsung).

### **C. Perhitungan IPK**

Data indikator IPK Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan data selanjutnya diolah dengan mengubah nilai indikator dalam rentang yang sama yaitu 0 - 100. Proses normalisasi data ini perlu memperhatikan sifat dari masing-masing indikator, apakah arahnya positif atau negatif. Suatu indikator memiliki arah positif jika semakin besar nilainya mengindikasikan kondisi yang semakin membaik. Sebaliknya, suatu indikator memiliki arah negatif jika semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin memburuk.

Selanjutnya, indikator harus dinormalisasi menggunakan Persamaan 1 untuk data positif dan Persamaan 2 untuk data negatif. Adapun persamaan yang digunakan dalam normalisasi nilai indikator adalah sebagai berikut:

### **Persamaan 1**

Untuk indikator bernilai positif:

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} \times 100$$

### **Persamaan 2**

Untuk Indikator bernilai negatif:

$$SX_i = 100 - \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} \times 100$$

Keterangan:

$SX_i$  adalah nilai indikator  $i$  yang sudah dinormalisasi

$X_i$  adalah nilai indikator  $i$  (empiris)

$X_{i.min}$  adalah nilai minimal indikator  $i$  (ditetapkan)

$X_{i.max}$  adalah nilai maksimal indikator  $i$  (ditetapkan)

Selanjutnya, data hasil normalisasi akan dihitung nilai indeks dimensi dengan mengamsumsikan bobot masing-masing indikator sama, sehingga persamaan yang digunakan sebagai berikut:

### **Persamaan 1:**

$$Indeks D_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \times 100$$

**Keterangan:**

$SX_{ji}$  adalah nilai indikator  $i$  pada dimensi ke- $j$  yang sudah dinormalisasi

$n_j$  adalah banyaknya indikator dimensi ke- $j$

$Indeks D_j$  adalah indeks dimensi ke- $j$

Hasil perhitungan di atas kemudian dihitung dengan menambahkan pembobotan masing-masing dimensi untuk menentukan nilai IPK dengan menggunakan persamaan 2.

**Persamaan 2:**

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$$

**Keterangan:**

IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan

$D_j$  adalah Dimensi ke- $j$

$W_j$  adalah Bobot Dimensi ke- $j$

## BAB III

# HASIL PERHITUNGAN IPK TAHUN 2022

Pembangunan kebudayaan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan peradaban bangsa, sekaligus berperan terhadap peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah mulai mengarusutamakan pembangunan kebudayaan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional, salah satunya melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Penyusunan IPK berusaha mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Perhitungan IPK pertama kali dilakukan pada tahun 2018 di level nasional dan provinsi. Melihat pentingnya IPK dalam menjaga sinergitas kontribusi unsur kebudayaan pada pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan perhitungan IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dengan menggunakan berbagai sumber informasi, baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh capaian IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebesar 49,08 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1: Hasil Perhitungan IPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022

Dimensi	Nilai Indeks	
	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
Ekonomi Budaya	21,00	29,65
Pendidikan	74,25	72,20
Ketahanan Sosial Budaya	73,28	72,46

Dimensi	Nilai Indeks	
	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
Warisan Budaya	58,92	37,44
Ekspresi Budaya	32,70	24,33
Budaya Literasi	36,60	60,09
Gender	46,84	55,88
<b>IPK Total</b>	<b>49,08</b>	<b>52,49</b>

Tabel 3.2: Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

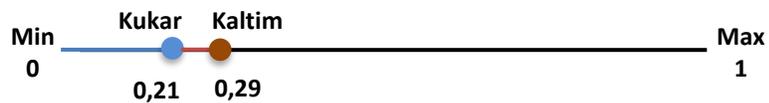
No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai	Target	Persentase
<b>Dimensi 1. Ekonomi Budaya (D1)</b>					
1	X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0,21	1	21
<b>Dimensi 2. Pendidikan (D2)</b>					
2	X2.1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+	9,23	15	61,53
3	X2.2	Harapan lama sekolah penduduk usia 7+	13,6	18	75,56
4	X2.3	Angka Kesiapan Sekolah	89,40	100	89,40
5	X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian	11,66	45	25,91
6	X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	100	100	100
7	X2.6	Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah	93,12	100	93,12

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai	Target	Persentase
<b>Dimensi 3. Ketahanan Sosial Budaya (D3)</b>					
8	X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	91,72	100	91,72
9	X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	94,33	100	94,33
10	X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama	88,67	100	88,67
11	X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku	93,20	100	93,20
12	X3.5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	88,47	100	88,47
13	X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	59,24	100	59,24
14	X3.7	Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	44,51	50	10,98
15	X3.8	Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga	59,61	100	59,61
<b>Dimensi 4. Warisan Budaya (D4)</b>					
16	X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	3,03	50	6,06
17	X4.2	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	45,72	50	91,44

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai	Target	Persentase
18	X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	38,26	100	38,26
19	X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	18,03	70	25,76
20	X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	10,38	30	34,60
21	X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	83,04	95	87,41
<b>Dimensi 5. Kebebasan Ekspresi Budaya (D5)</b>					
22	X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	17,67	30	58,90
23	X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	7,00	20	35,00
24	X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1,21	7	17,29
25	X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	8,82	45	19,60
<b>Dimensi 6. Budaya Literasi (D6)</b>					
26	X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	10,98	70	15,69
27	X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	68,02	85	80,02
28	X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan Masyarakat	3,53	25	14,12

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai	Target	Persentase
<b>Dimensi 7. Gender (D7)</b>					
29	X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	44,10	100	44,10
30	X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	77,99	100	77,99
31	X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	18,42	100	18,42

Pada nilai indikator di atas terdapat empat dimensi yang memiliki nilai indeks lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, dan Dimensi Ekspresi Budaya. Sedangkan 3 dimensi lainnya masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur dengan indeks terkecil adalah Dimensi Budaya Literasi yang cukup jauh intervalnya dengan Provinsi, yaitu 36,60 menuju 60,09.



### Dimensi Ekonomi Budaya

Hanya 0,21 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang sumber penghasilannya berasal dari keterlibatan mereka sebagai pelaku pertunjukan seni. Nilai demikian cukup menggambarkan bagaimana kesenian di Kabupaten Kutai Kartanegara belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku/pendukung seni. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, komunitas seni didirikan oleh para ASN atau pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintahan sebagai tempat menyalurkan hobi dan ekspresi.

Sehingga kebanyakan penghasilan yang diterima merupakan penghasilan tambahan bukan penghasilan utama, karena tidak ada kegiatan berkesenian yang rutin dan memperoleh penghasilan. Kegiatan berkesenian sebagian besar masih terbatas pada proses kreatif. Bentuk dukungan dalam hal manajemen pertunjukan, *sponsorship*, publikasi, hingga promosi perlu ditingkatkan.

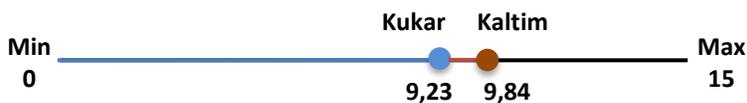


### Dimensi Pendidikan



Indeks dimensi pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat enam (6) indikator penyusun dimensi ini dengan nilai tertinggi pada indikator persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah yaitu 100% dan indikator terendah adalah persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan ekskul kesenian yaitu 25,91%. Masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut:

#### Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas



Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 9,23 tahun (61,53%) atau lulus SMP kelas 9 dan putus sekolah saat masih di kelas 10 SMA. Perlu usaha yang cukup keras agar dapat memenuhi target 15 tahun atau sampai lulus kuliah Diploma III.

### Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas



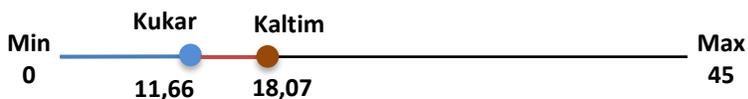
Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 13,6 tahun atau 75,56 %. Perlu stimulan dari pemerintah agar penduduk memiliki harapan maksimal untuk bersekolah hingga target 18 tahun atau setara Strata 1.

### Angka Kesiapan Sekolah



Angka kesiapan sekolah menurut Badan Pusat Statistik (BPK) adalah Persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD, terhadap seluruh siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD. Capaian Kabupaten Kutai Kartanegara 89,40 % berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berarti pemerintah telah berusaha mengurangi angka putus sekolah karena anak-anak telah siap mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal dan siap untuk berprestasi.

### Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian



Hanya 25,91 persen satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki guru yang mengajar mata pelajaran kesenian, sedangkan guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah belum tersedia. Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan pelatihan untuk guru

yang akan mengajar muatan lokal bahasa daerah sebagai persiapan pengajaran di tahun selanjutnya. Sedangkan untuk ekskul kesenian tidak ada dan digantikan dengan ekskul lainnya karena sudah diampu oleh mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) di setiap level SD, SMP, dan SMA atau sederajat.

Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah



Penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah memberi sumbangan paling besar pada dimensi ini dengan nilai 100 persen. Namun, perlu diterangkan bahwa angka tersebut diperoleh dari hasil Survei Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang memerlukan pengecekan lapangan lebih lanjut.

Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah



Capaian pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah (termiskin) adalah 93,12, mendekati capaian Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah telah cukup baik melakukan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk seluruh lapisan ekonomi penduduk dengan menggratiskan biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri dan kemudahan fasilitas lainnya.



### Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Kerukunan antar umat beragama dan antar suku serta rendahnya angka kriminalitas jalanan merupakan modal sosial yang berperan penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah. Pada dimensi ketahanan sosial budaya yang terdiri atas delapan dimensi ini, indikator persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal menyumbang angka terbesar (94.33 persen). Indikator lainnya diuraikan sebagai berikut:

Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari **agama lain yang melakukan kegiatan** di lingkungan sekitar tempat tinggal.



Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari **suku lain yang melakukan kegiatan** di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga **bersahabat dengan orang lain yang beda agama**.



Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga **bersahabat dengan orang lain yang beda suku**.

Nilai keempat indikator di atas mencerminkan adanya kerukunan dalam kehidupan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara walau berbeda agama dan suku, tidak ada halangan dalam melakukan kegiatan dan bersahabat dengan suku dan agama lain. Menurut hasil wawancara dengan Bagian Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, suku yang mendiami wilayah ini cukup beragam yang terdiri dari Kutai, Jawa, Sasak, Toraja, Bali, Padang, Batak, Dayak, Madura, Banjar, Bakumpai, Bugis, Makassar, NTT, Manado, Bima, Maluku, Buton, Sunda, Tionghoa, dll. Beragam suku tersebut hidup berdampingan secara rukun di Kutai Kartanegara, tanpa pernah menimbulkan konflik yang eskalatif.

Demikian pula dengan kerukunan umat beragama antara penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, kepercayaan lokal, dan lain sebagainya hidup berdampingan dengan rukun. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah daerah untuk selalu menyuarkan pembinaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, pengembangan moderasi beragama, serta pembangunan akhlak bangsa.

Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir.



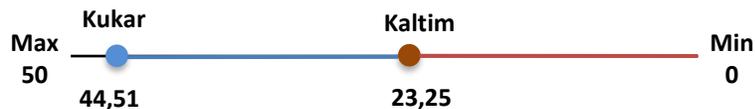
Sebanyak 88,47 persen penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang berumur 10 tahun ke atas mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir, misalnya pengajian-pengajian, bakti sosial, peringatan hari besar, dan lain-lain. Nilai indikator ini jauh lebih baik dari capaian Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat melakukan kegiatan sosial.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.



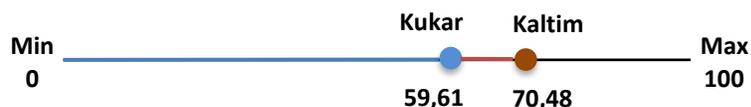
Walaupun capaian Kabupaten Kutai Kartanegara masih diatas Provinsi Kalimantan Timur, namun indikator ini masih perlu perhatian, karena hanya 59,24 % penduduk yang masih melakukan gotong royong di lingkungannya. Sedangkan sisanya masih bersifat individual dan tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. Budaya ini perlu ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan sosial budaya di tengah kemajemukan masyarakat.

Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir.

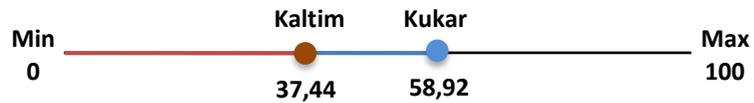


Masih terdapat 44,51 persen rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan agar nilai ini dapat diturunkan minimal sama dengan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 23,25 persen.

Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga.



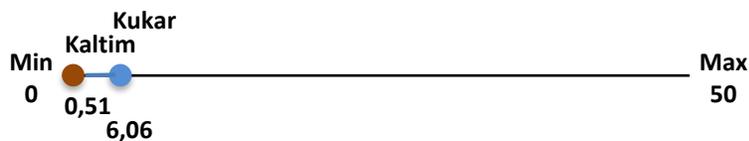
Hanya 59,61 persen masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga, sehingga jika harus bepergian harus ada anggota keluarga lain yang tetap berada di rumah. Pemerintah perlu melakukan upaya pengamanan agar nilai indikator ini dapat ditingkatkan.



### Dimensi Warisan Budaya

Kutai Kartanegara yang memiliki sejarah dan peradaban panjang sejak masa lampau memang meninggalkan banyak warisan budaya yang patut dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Dimensi keempat ini terdiri dari enam indikator penyusun, di mana persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi menjadi indikator penyumbang nilai terbesar (91,44 persen). Empat indikator tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi.



Terdapat 6,06 persen benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagai Cagar Budaya. Pada tahun 2022, Tim Ahli Cagar Budaya telah melakukan sidang terhadap 9 (sembilan) objek yang diduga Cagar Budaya dan diharapkan dapat segera ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten untuk meningkatkan nilai indikator ini dan mencapai target (50).

Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi.



Hingga tahun 2021, sebanyak 11 karya budaya dari Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari total yang telah diregistrasi. Di tahun 2022 telah diusulkan kembali sebanyak lima (5) karya budaya dan menunggu penetapan selanjutnya. Nilai indikator ini berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan banyaknya karya budaya dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan membutuhkan perhatian pemerintah dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan untuk pemajuan kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari.



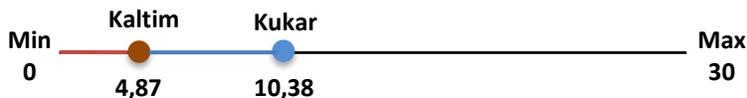
Hanya 38,26 persen penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang menggunakan bahasa daerah baik di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat banyak suku yang mendiami seluruh kecamatan dan terjadi akulturasi bahasa dan kebiasaan dikarenakan perkawinan, sehingga bahasa yang digunakan pun menjadi bahasa Indonesia. Hanya perkawinan antar suku dan komunitas dengan suku yang sama yang menggunakan bahasa daerah sukunya. Pemerintah perlu melakukan upaya cukup keras untuk meningkatkan nilai indikator ini misalnya melalui muatan lokal bahasa daerah di sekolah atau mengadakan hari berbahasa daerah di instansi pemerintahan.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.



Antusiasme penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara usia 10 tahun ke atas ditunjukkan dengan capaian 67,02 persen yang menonton pertunjukan seni bahkan hampir mencapai target 70 persen. Festival-festival tahunan rutin dilaksanakan dari level kabupaten sampai kecamatan, antara lain TIFAF, Festival Kota Raja, Erau, Peringatan Peristiwa Merah Putih, Festival Kampung, Gowes Wisata, dan masih banyak even lainnya sebanyak 40 even di tahun 2022.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah.



Hanya 10,38 persen dari target 30 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah perlu memberikan daya tarik terhadap peninggalan sejarah agar semakin banyak penduduk yang memanfaatkan peninggalan sejarah sebagai tempat kunjungan wisata dan mensejahterakan masyarakat di sekitar sekaligus memperkuat dimensi warisan budaya.

Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional

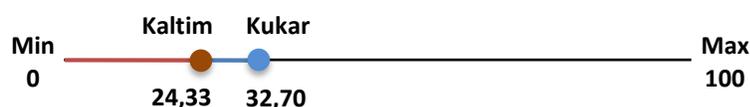


Capaian indikator rumah tangga yang menggunakan produk tradisional di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 83,04 persen. Hal ini menunjukkan masih banyak

rumah tangga yang kesehariannya menggunakan peralatan rumah tangga tradisional, membuat masakan dan jajanan khas daerah, hingga menggunakan pakaian tradisional di tempat kerja. Pemerintah perlu memberikan stimulan agar dapat mencapai target 95 persen.



### Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya



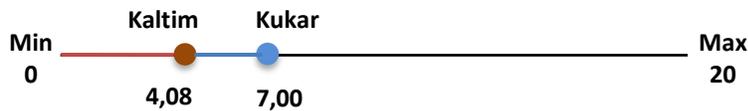
Kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk dalam bidang kebudayaan merupakan hak dasar manusia. Pada dimensi kelima mengenai ekspresi budaya memuat kebebasan manusia untuk mengekspresikan budaya di ruang publik, terdapat empat indikator penyusun sebagai berikut:

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir



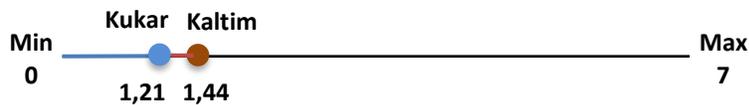
Penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat (58,90 persen) menjadi indikator penyumbang terbesar pada dimensi ini. Hal ini menandakan diterapkannya demokrasi secara menyeluruh di forum-forum publik yang diadakan oleh pemerintah daerah Kutai Kartanegara hingga ke level RT/RW dan forum-forum warga lainnya. Proses tukar pendapat antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berbasas pada keadilan. Sebab, musyawarah mufakat merupakan budaya masyarakat Indonesia yang termuat dalam sila keempat Pancasila.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi



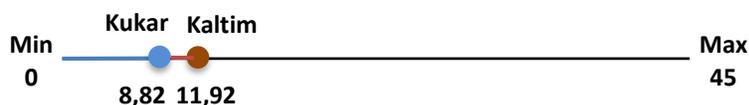
Walaupun capaian diatas Provinsi Kalimantan Timur, namun masih jauh dari target yaitu 20 persen. Perlu upaya cukup keras dari pemerintah agar penduduk usia 10 tahun ke atas aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di sekolah dan di masyarakat.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni



Hanya 1,21 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni. Pemerintah perlu upaya ekstra untuk membuat pertunjukan seni yang lebih menarik agar menambah jumlah penduduk yang berkecimpung di dalamnya.

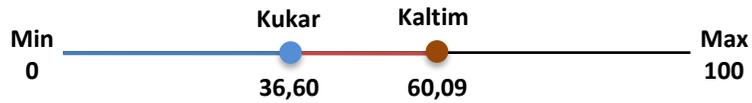
Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat



Hanya 8,82 persen rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan upacara adat. Upacara yang masih dilakukan adalah upacara pernikahan, tujuh bulanan, dan pemberian nama (tasmiyah). Hal ini membutuhkan perhatian pemerintah untuk mencapai target 45 persen.



### Dimensi Budaya



Aktivitas literasi dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat termuat dalam dimensi budaya literasi. Dimensi ini didukung oleh tiga indikator, yaitu:

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir



Hanya 10,98 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir. Angka ini sangat rendah dibandingkan dengan Provinsi dan target 70 %. Perlu upaya keras pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

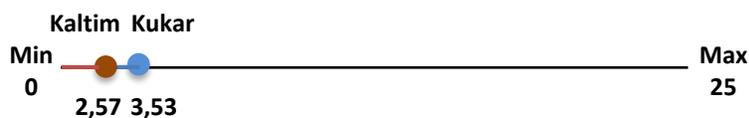
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir



Dari tiga indikator pembentuk dimensi ini, penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet 68,02 persen menjadi penyumbang terbesar dimensi ini. Penetrasi internet memang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tidak terkecuali di Kutai

Kartanegara. Internet dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer masyarakat saat ini yang mempermudah akses informasi dan pengetahuan, sarana komunikasi, kemudahan bisnis, hingga hiburan. Internet juga membuat masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terhubung dengan komunitas lain di Indonesia bahkan dunia.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat



Namun yang perlu diperhatikan dari dimensi ini adalah rendahnya penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat hanya 3,53 persen dari target 25 persen. Menurut data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara, jumlah kunjungan Perpustakaan Daerah memang mencapai ribuan setiap tahun, tetapi perpustakaan di tingkat desa/kelurahan sangat sedikit didatangi pembaca. Hal ini disebabkan oleh kurangnya referensi buku bacaan yang tersedia, minimnya jumlah pustakawan, dan belum masifnya sosialisasi kepada masyarakat.



### Dimensi Budaya Literasi



Dimensi gender menjadi dimensi terakhir dalam penyusunan IPK. Dimensi ini mengakomodir persamaan hak, tanggung jawab, serta peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Ketiga indikator penyusun dimensi ini membandingkan keterlibatan

perempuan terhadap laki-laki pada beberapa bidang yaitu pekerjaan, pendidikan, dan politik yang diuraikan sebagai berikut:

Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki



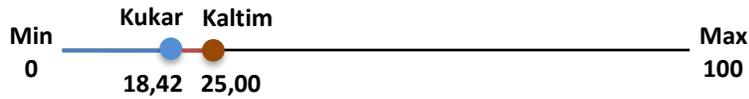
Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 44 orang perempuan dari 100 orang laki-laki yang bekerja. Pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan untuk meningkatkan rasio agar sama dengan jumlah laki-laki yang bekerja.

Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat



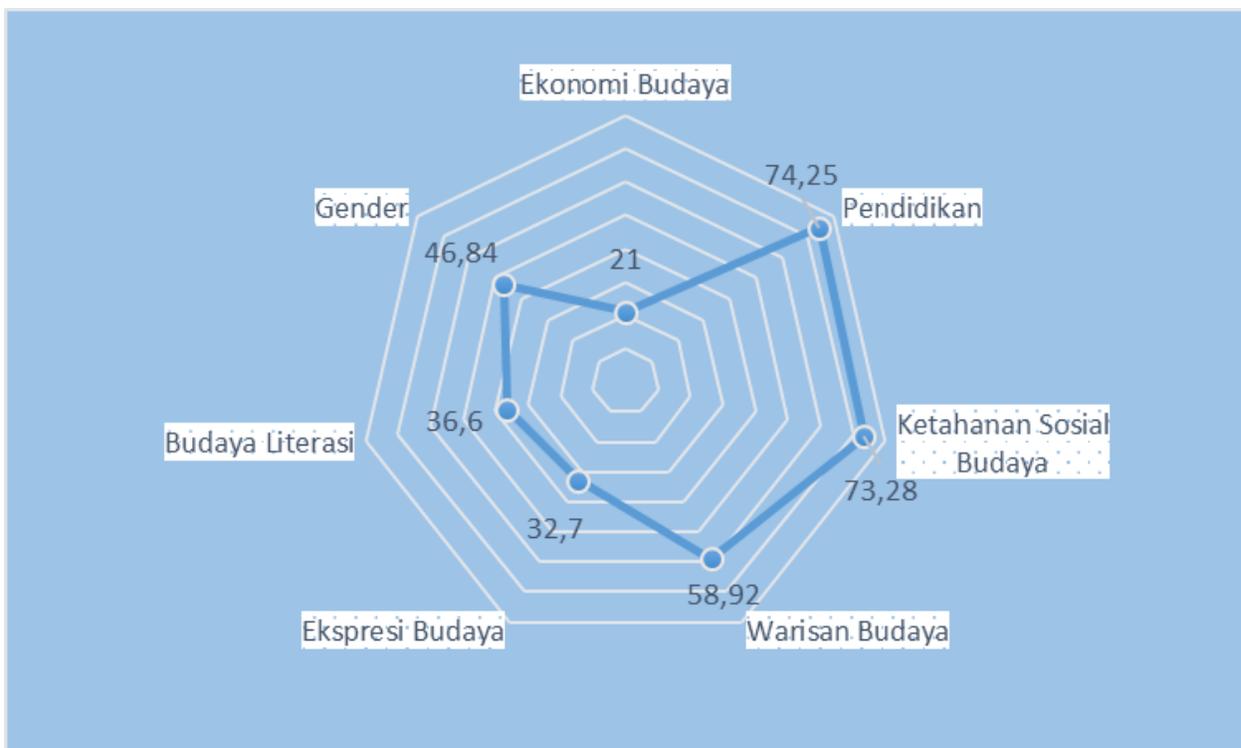
Indikator rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat (77.99 persen) memberikan sumbangan terbesar dalam membentuk dimensi ini. Angka yang cukup tinggi pada indikator ini menunjukkan adanya kemudahan akses bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk berdaya saing dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan di tengah budaya patriarki yang masih mengakar di sebagian komunitas masyarakat.

Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki



Ada sekitar 18 orang perempuan dari 100 orang laki-laki yang menjadi anggota parlemen. Indikator ini masih harus ditingkatkan untuk mencapai 100 orang.

Gambar 3.1: Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022



Apabila menilik nilai dimensi pada gambar di atas, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara dimensi yang satu dengan lainnya. Dimensi dengan hasil tertinggi adalah Pendidikan (74,25). Tingginya nilai dimensi pendidikan menunjukkan cukup mapannya sarana prasarana dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai aspek yang menunjang pembangunan dan transformasi kebudayaan. Sedangkan nilai dimensi Ekonomi Budaya menghasilkan nilai indeks terendah (21,00)

yang menunjukkan bahwa masih cukup rendahnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Gambar 3.2: Perbandingan IPK Kabupaten Kutai Kartanegara dengan IPK Kalimantan Timur



Pada gambar di atas menunjukkan empat (4) dimensi yang memiliki nilai indeks di atas angka provinsi yaitu Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya. Sementara tiga (3) dimensi lainnya yakni Ekonomi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender menghasilkan nilai yang berada di bawah angka provinsi. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan di masa mendatang dengan mendorong lahirnya kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

# BAB IV

## PENUTUP

### A. Simpulan

Kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Pengumpulan data IPK dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder yang selanjutnya diolah untuk memperoleh nilai IPK. Adapun IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 49,08, lebih kecil dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Timur yaitu 52,49. IPK dibentuk dari tujuh dimensi, di mana dimensi pendidikan menjadi penyumbang nilai terbesar yaitu 74,25, sedangkan dimensi ekonomi budaya berada di peringkat terbawah dengan nilai 21,00.

### B. Saran

1. Adanya sinergi antar instansi yang akan menyediakan data dalam penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022;
2. Mengumpulkan sumber data yang sesuai dengan indikator dari seluruh dimensi
3. Melakukan kajian sumber data dan metode pengumpulan data

# DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. 2022. *Kutai Kartanegara dalam Angka Tahun 2022*. BPS Kutai Kartanegara: Kutai Kartanegara
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2021. *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021*. BPS Kalimantan Timur: Samarinda
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021*. BPS Kalimantan Timur: Samarinda
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. 2018. *Handbook Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta



# LAMPIRAN

**NILAI INDIKATOR DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2022**

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai
1	X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0.21
2	X2.1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+	9.23
3	X2.2	Harapan lama sekolah penduduk usia 7+	13.6
4	X2.3	Angka Kesiapan Sekolah	89.40
5	X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian	11.66
6	X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	100
7	X2.6	Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah	93.12
8	X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	91.72
9	X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	94.33

10	X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama	88.67
11	X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku	93.2
12	X3.5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	88.47
13	X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	59.24
14	X3.7	Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	44.51
15	X3.8	Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga	59.61
16	X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	3.03
17	X4.2	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	45.72
18	X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	38.26
19	X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	67.02
20	X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	10.38

21	X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	83.04
22	X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	17.67
23	X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	7.0
24	X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1.21
25	X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	8.82
26	X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	10.98
27	X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	68.02
28	X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	3.53
29	X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	44.10
30	X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	77.99
31	X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	18.42

**FOTO KEGIATAN PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2022**



Konsultasi dan Permintaan Data di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur



Permintaan data dimensi warisan budaya di Bidang Cagar Budaya & Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara



Permintaan data dimensi budaya literasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Kartanegara



Permintaan data dimensi ketahanan sosial budaya di Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara



Permintaan data dimensi kebebasan ekspresi budaya di Kantor Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu



Permintaan data dimensi pendidikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara



Kegiatan pra-seminar Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 pada 1 Desember 2022 di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur



Kegiatan seminar Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 pada 5 Desember 2022 di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur